

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Analisis Resepsi Publik terhadap Politik Dinasti Pasca-Pemilu 2024 pada Podcast Total Politik: Studi Netnografi Media Sosial X*, dapat disimpulkan bahwa publik tidak memaknai isu politik dinasti secara seragam, melainkan membentuk beberapa interpretasi berdasarkan pengalaman politik, nilai demokrasi, serta pemahaman masing-masing individu terhadap praktik kekuasaan di Indonesia. Podcast Total Politik bersama Pandji Pragiwaksono berperan sebagai pemicu munculnya diskursus politik di media sosial X yang kemudian berkembang menjadi ruang pertukaran gagasan, kritik, pembelaan, maupun negosiasi terhadap praktik politik dinasti. Dengan demikian, makna politik dinasti tidak dibentuk secara sepihak oleh isi podcast, tetapi juga dikonstruksi kembali oleh pengguna X melalui interaksi digital yang berlangsung secara terbuka.

Hasil observasi netnografi menunjukkan bahwa *reception* publik terhadap politik dinasti terbagi ke dalam 3 pola pemaknaan utama. Pola pertama merupakan kelompok yang memandang politik dinasti sebagai ancaman terhadap demokrasi, meritokrasi, dan keadilan politik. kelompok ini mendominasi hasil penelitian dengan 26 komentar dari 58 komentar yang dikumpulkan. Pada pola ini, mereka menilai bahwa praktik politik dinasti mempersempit sirkulasi elit politik, membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan, memperkuat oligarki politik, serta melemahkan prinsip meritokrasi dan prinsip kesetaraan kesempatan dalam sistem demokrasi. Dalam pandangan ini, keterlibatan keluarga penguasa dalam kontestasi politik pada Pemilu 2024 dipersepsikan sebagai bentuk melanggar kekuasaan yang berpotensi menurunkan kualitas demokrasi Indonesia. Kritik yang muncul juga menunjukkan tingginya sensitivitas publik terhadap isu etika politik, independensi lembaga negara, serta pentingnya mekanisme rekrutmen politik yang berbasis kompetensi dibanding hubungan kekerabatan.

Pola kedua memperlihatkan adanya kelompok publik yang memandang politik dinasti sebagai praktik politik yang sah. Kelompok ini terdiri dari 18 komentar dari 58 komentar yang dikumpulkan, yang membenarkan praktik politik dinasti. Pada pandangan ini, mereka menilai bahwa setiap warga negara, termasuk keluarga pejabat, memiliki hak politik yang sama untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik, serta menormalisasikan praktik politik dinasti sebagai fenomena yang sering terjadi dan menjadi budaya politik di Indonesia. Oleh karena itu, kelompok ini lebih menekankan konsep *human rights* dan *Asian Values* untuk mendukung argumentasi mereka.

Sementara itu, pola yang terakhir terdiri dari 14 dari 58 komentar yang dikumpulkan, yang memberikan legitimasi terhadap politik dinasti secara bersyarat, di mana mereka yang termasuk dalam kelompok ini tidak sepenuhnya menolak dan menerima praktik politik dinasti. Kelompok ini tidak menilai hubungan keluarga sebagai persoalan utama selama individu yang bersangkutan memiliki kompetensi, kapasitas kepemimpinan, rekam jejak yang baik, serta memperoleh legitimasi melalui proses pemilihan yang demokratis. Dengan kata lain, kelompok ini memandang bahwa keberadaan politik dinasti tidak selalu identik dengan kemunduran demokrasi apabila proses elektoral tetap berlangsung secara terbuka dan sesuai dengan peraturan konstitusi, agar dapat menghasilkan pemimpin yang mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat lebih memfokuskan evaluasi terhadap kualitas individu dibanding latar belakang hubungan keluarganya.

Melalui perspektif *Reception Analysis* Stuart Hall, ketiga pola pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa publik merupakan audiens yang aktif dalam melakukan proses *decoding* terhadap narasi politik yang disampaikan dalam podcast. Sebelumnya, penulis sudah menetapkan encoding pada podcast tersebut bahwa politik dinasti merupakan isu politik yang problematis dan layak diperdebatan karena dampaknya bagi demokrasi. Maka dari itu, kelompok yang menganggap dan mengkritik politik dinasti dikategorikan sebagai *dominant-hegemonic reading*, karena menerima pesan dominan podcast yang memandang politik dinasti sebagai persoalan yang serius bagi demokrasi. Lalu, untuk

kelompok yang mengakui persoalan politik tetapi tetap mempertimbangkan legalitasnya berada pada posisi *negotiated reading*, karena menerima sebagian makna yang disampaikan namun menyesuaikan dengan pengalaman, nilai, hukum, dan pertimbangan politik lainnya sebagai bentuk negosiasi. Terakhir, kelompok yang membela dan menerima politik dinasti termasuk dalam *oppositional reading*, karena menolak makna dominan yang dibangun dalam podcast dan membentuk interpretasi alternatif bahwa politik dinasti merupakan bagian dari hak politik setiap warga negara ataupun konsekuensi dari sistem demokrasi yang terbuka. Temuan ini memperlihatkan bahwa proses pembentukan makna politik dipengaruhi oleh latar belakang sosial, orientasi ideologis, pengalaman demokrasi, serta cara masing-masing individu memahami relasi antara kekuasaan dan demokrasi.

Selanjutnya, berdasarkan perspektif demokrasi digital, penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial X telah berfungsi sebagai ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan opini politik. Diskusi yang berkembang memperlihatkan adanya partisipasi politik digital melalui penyampaian pendapat, kritik, argumentasi, maupun interaksi antarpengguna. Selain memperluas ruang partisipasi, platform X juga menjadi arena deliberasi publik yang memungkinkan terjadinya pertukaran perspektif mengenai politik dinasti, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi mengonsumsi informasi politik, tetapi juga berperan memproduksi makna dan membentuk diskursus politik. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas deliberasi digital masih diwarnai oleh polarisasi pandangan, penggunaan argumentasi yang masih emosional, serta kecenderungan membangun kubu-kubu opini yang saling berhadapan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan ruang digital belum sepenuhnya diikuti oleh kualitas dialog demokratis yang ideal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menjawab rumusan masalah bahwa pemaknaan publik terhadap politik dinasti pasca-Pemilu 2024 di media sosial X terbentuk melalui proses interpretasi yang beragam, dan dipengaruhi oleh nilai demokrasi, pengalaman politik, serta orientasi ideologis masing-masing individu. Politik dinasti tidak lagi dipahami hanya sebagai persoalan hubungan

kekerabatan dalam kekuasaan, tetapi telah berkembang menjadi simbol perdebatan mengenai meritokrasi, keadilan politik, legitimasi kekuasaan, dan kualitas demokrasi Indonesia. Penelitian ini sekaligus menegaskan bahwa media sosial X memiliki peran strategis sebagai arena demokrasi digital yang mempertemukan berbagai kepentingan, nilai, dan perspektif politik masyarakat, sehingga mampu membentuk diskursus publik yang memengaruhi cara masyarakat memahami praktik kekuasaan dalam demokrasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang dapat diberikan, sebagai berikut.

5.2.1 Saran Akademis

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada validitas sampel dan representasi data. Data penelitian hanya diperoleh melalui teknik purposive sampling terhadap komentar pengguna media sosial X pada enam unggahan dengan tingkat interaksi yang tinggi, sehingga temuan penelitian ini tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan keseluruhan pandangan masyarakat terhadap isu politik dinasti. Penelitian ini juga masih terbatas pada analisis resepsi publik di platform X dengan fokus pada diskusi yang muncul setelah podcast Total Politik bersama Pandji Pragiwaksono dipublikasikan. Selain itu, penelitian hanya menggunakan data komentar yang tersedia secara publik tanpa melakukan wawancara kepada informan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan data, menggunakan variasi objek kajian maupun platform media sosial lainnya dengan membandingkan berbagai media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, Threads, maupun YouTube, serta mempertimbangkan penggunaan wawancara atau metode lain sebagai bentuk triangulasi agar memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika *reception* publik terhadap isu politik dinasti. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkombinasikan pendekatan netnografi dengan metode lain, seperti analisis jaringan sosial (*Social Network Analysis*), analisis sentiment dengan wawancara

mendalam terhadap pengguna media sosial sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pembentukan opini publik di ruang digital.

Penulis juga merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan atau analisis persepsi untuk mengidentifikasi pandangan masyarakat terhadap isu politik dinasti secara lebih mendalam. Dengan demikian, hasil penelitian menggunakan analisis persepsi dapat dibandingkan dengan temuan yang diperoleh melalui Reception Analysis sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih komperhensif mengenai respons publik terhadap isu politik dinasti di ruang digital.

5.2.2 Saran Praktis

Bagi pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, serta lembaga negara lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kualitas demokrasi, khususnya dalam proses rekrutmen politik agar tetap berorientasi pada prinsip meritokrasi dan kompetisi yang adil.

Bagi masyarakat, khususnya generasi muda sebagai kelompok pengguna media sosial terbesar, penelitian ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya literasi politik digital yang lebih kritis sehingga masyarakat mampu menilai berbagai informasi politik secara rasional, berpartisipasi dalam diskusi publik secara bertanggung jawab, serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang bersifat provokatif maupun disinformasi.

Bagi media massa, media digital, dan pembuat konten politik, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bahwa media sosial memiliki peran strategis dalam membangun ruang deliberasi publik. Oleh karena itu penyajian informasi politik yang faktual, berimbang, dan mendorong dialog yang sehat perlu terus dikembangkan agar media digital dapat berfungsi sebagai ruang demokrasi yang inklusif dan konstruktif.